

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Rumusan Masalah	15
	I.3. Tujuan Penelitian	18
	I.4. Manfaat Penelitian	19
	I.5. Keaslian Penelitian/Kebaruan	20
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	25
	II.1. Proses Pengambilan Keputusan	25
	II.1.1. Tahapan Pengambilan Keputusan	25
	II.1.2. Model Pengambilan Keputusan	28
	II.2. Proses Pengambilan Keputusan Model <i>Allison</i>	30
	II.2.1. Model Aktor Rasional	33
	II.2.2. Model Perilaku Organisasi	40
	II.2.3. Model Politik Birokrasi	45
	II.3. Pengambilan Keputusan Pembiaran	54
	II.4. Kerangka Penelitian	59
	II.5. Definisi Operasional	60
BAB III	METODE PENELITIAN	63
	III.1. Kerangka Pendekatan Penelitian	63
	III.2. Lokasi Penelitian	65
	III.3. Tahapan Penelitian	67
	III.4. Teknik Pengumpulan Data	68
	III.5. Teknik Analisis Data	69
BAB IV	PERMASALAHAN TANAH AB DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	73
	IV.1. Pengelolaan Hutan di DI Yogyakarta	73
	IV.1.1. Pengelolaan Hutan Masa Pemerintahan Hindia-Belanda	73
	Kesimpulan	94
	IV.1.2. Pengelolaan Hutan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia	95
	Kesimpulan	108
	IV.2. Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	109
	V.2.1. Pemantapan Kawasan Hutan	109
	V.2.2. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	114
	Kesimpulan	115
	V.3. Permasalahan <i>Tanah Ab</i> di Kabupaten Gunung Kidul	116
	V.3.1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul	116
	V.3.2. <i>Tanah Ab (Ab Gronden)</i> di Kabupaten Gunung Kidul	119
	Kesimpulan	150

	V.3.3. Permasalahan <i>Tanah Ab</i> di Kabupaten Gunung Kidul	151
	Kesimpulan	162
BAB V	PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH AB	164
	V.1. Identifikasi Permasalahan	164
	V.2. Pengembangan Alternatif: Dualisme Kebijakan Penyelesaian Permasalahan <i>Tanah Ab</i> di Kabupaten Gunung Kidul	167
	V.2.1. Status <i>Tanah Ab</i> dan Kebijakan Penyelesaian Penguasaan <i>Tanah Ab</i> sesuai Undang-undang Keistimewaan DI Yogyakarta	168
	V.2.2. Status <i>Tanah Ab</i> dan Kebijakan Penyelesaian Penguasaan <i>Tanah Ab</i> sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017	176
BAB. VI.	PENDEKATAN PERSPEKTIF ALLISON DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	182
	VI.1. Ragam Rasionalitas dalam Model Aktor Rasional	182
	Kesimpulan	194
	VI.2. Ragam Prosedur Organisasi dalam Model Perilaku Organisasi	198
	Kesimpulan	209
	VI.3. Proses Politik dan <i>Bargaining</i> dalam Model Politik Organisasi	213
	Kesimpulan	242
	VI.4. Kebijakan Penyelesaian Permasalahan <i>Tanah Ab</i>	245
	VI.5. Pembiaran Permasalahan <i>Tanah Ab</i> dalam Perspektif Allison	250
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	270
	VII.1. Kesimpulan	271
	VII.2. Rekomendasi.....	273

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

- 1.1 Identifikasi Pemanfaatan *Tanah Ab* oleh Masyarakat di luar kepentingan kehutanan.
- 1.2 Proses Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan Melalui TMKH sd 2014
- 2.1 Outline Model dan Konsep Pengambilan Keputusan Allison
- 2.2 Konsep Pembiaran
- 2.3 Kerangka Pikir Penelitian
- 2.4 Definisi Operasional Model Pengambilan Keputusan Allison
- 3.1 Peta Aktor Penyelesaian Permasalahan *Tanah Ab*
- 3.2 Kerangka Proses Penelitian
- 3.3 Tabel Rancangan Penelitian
- 4 Hirarki Administrasi Era Pemerintahan Hindia-Belanda (1800-1949)
- 4.1 Ketentuan Kehutanan Wilayah Yogyakarta
- 4.2 Pengelolaan Hutan Jati di Jawa-Madura Masa Pemerintahan Hindia-Belanda – 2020
- 4.3 Perkembangan Ketentuan Pengukuhan Kawasan Hutan Jawa
- 4.4 Luas Administrasi Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.5 Fungsi Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.6 Pengelolaan Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.7 Sebaran Wilayah KPH Yogyakarta menurut Pemanfaatan sd 2013
- 4.8 Arahan Fungsi dan Pengembangan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.9 Penyelenggaraan Pengurusan Hutan sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4.10 Proses Pengukuhan Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4.11 Data Luas dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul
- 4.12 Data Penggunaan Lahan di Kecamatan Lokasi Penelitian di Kabupaten Gunungkidul
- 4.13 Rekening Anggaran Kasultanan Yogyakarta Tahun 1927
- 4.14 Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan (*Tanah Ab*)
- 4.15 Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah *Tanah Ab*
- 4.16 Hutan Desa di Wilayah *Tanah Ab*
- 4.17 Sebaran *Tanah Ab* di Kabupaten Gunungkidul
- 4.18 Penggunaan dan Pemanfaatan *Tanah Ab*
- 4.19 Identifikasi Pemanfaatan Hutan Ab oleh Masyarakat di luar kepentingan kehutanan
- 4.20 Rekapitulasi Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Ab
- 4.21 Perubahan Perspektif dalam Okupasi *Tanah Ab*
- 4.22 Pemanfaatan dan Penguasaan *Tanah Ab*
- 4.23 Perkembangan *Tanah Ab*
- 4.24 Kronologis Permasalahan Tanah Ab

- 5.1 Proses Pengambilan Keputusan Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tanah Ab) oleh Dinas LHK DI Yogyakarta
- 5.2 Identifikasi Permasalahan Tanah Ab
- 5.3 Permasalahan Tanah Ab
- 5.4 Dokumen Proses Verbaal Hutan Jati di Gunung Kidul (1933)
- 5.5 Skema Skema Mekanisme Kebijakan Penyelesaian Permasalahan *Tanah Ab* di Kabupaten Gunung Kidul

- 6.1 Pengambilan Keputusan Model Aktor Rasional oleh Dirjen PKTL Kementerian LHK
- 6.2 Pengambilan Keputusan Model Aktor Rasional dalam Penyelesaian Permasalahan *Tanah Ab*
- 6.3. Pengambilan Keputusan Model Perilaku Organisasi dalam Penyelesaian Permasalahan *Tanah Ab*
- 6.4. Perspektif Landasan Hukum Keistimewaan Bidang Pertanahan di DI Yogyakarta
- 6.5. Struktur Keraton Yogyakarta
- 6.6. Pengambilan Keputusan Model Politik Pemerintah dalam Penyelesaian Permasalahan *Tanah Ab*
- 6.7 Model Pengambilan Keputusan Para Pihak atas Permasalahan Okupasi *Tanah Ab* berdasarkan Model Pengambilan Keputusan Allison
- 6.8 Pengambilan Keputusan Para Pihak atas Permasalahan Okupasi *Tanah Ab* berdasarkan Model Pengambilan Keputusan Allison
- 6.9 Konsep Pembiaran
- 6.10 Siklus Proses Kebijakan
- 6.11 Lingkungan Kebijakan Faktor Penyebab Pengambilan Keputusan Pembiaran
- 6.12 Rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah
- 6.13 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah DI Yogyakarta (Lampiran Perdais DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2018)
- 6.14 Struktur Organisasi Dinas LHK DI Yogyakarta (Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 95 Tahun 2018)
- 6.15 Struktur Organisasi Kementerian LHK (Peraturan Men LHK No. 18/MenLHK-II/2015 dan Peraturan Menteri LHK No. P. 6/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016)

DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Peta Kawasan Hutan DI Yogyakarta
- 4.2 Peta Rencana Pola Ruang DI Yogyakarta 2005 – 2025
- 4.3 Keterangan *Tanah Ab*
- 4.4 Keterangan *Tanah Ab*
- 4.5 Peta *Tanah Ab* Kalurahan Balong, Gunung Kidul
- 4.6 Peta *Tanah Ab* Desa Kanigoro, Gunung Kidul
- 4.7 Legenda Peta *Tanah Ab (Ab Gronden)*
- 4.8 Penataan Hutan *Ab (Afgeschrijven djatituin)*
- 4.9 Peta *Tanah Ab* di *Afdeling* Djember

DAFTAR SINGKATAN

<i>Ab Gronden</i>	: <i>Afgeschriven djati Boscsh Gronden</i>
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dispartaru	: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KP	: Kuasa Pengelolaan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAG	: <i>Paku Alam Ground</i>
PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PPTKH	: Penyelesaian Permasalahan Tanah dalam Kawasan Hutan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PTSL	: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Perpres	: Peraturan Presiden
SG	: <i>Sultan Ground</i>
St.	: <i>Staatsblad</i>
Tapem	: Tata Pemerintahan
TMKH	: Tukar Menukar Kawasan Hutan
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria